



KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

**ORASI ILMIAH KETUA DPR-RI PADA ACARA HALAL BIHALAL
DENGAN AKTIVIS MAHASISWA DI JAKARTA**

“MENEGUHKAN KOMITMEN AKTIVISDALAM MENGAWAL AGENDA PERGERAKAN”

Jakarta, 18 Oktober 2009

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pertama-tama, marilah kita persembahkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dan berdiskusi dalam suatu majelis ilmu, dimana saya diberikan kesempatan untuk memberikan suatu orasi ilmiah, suatu tradisi akademik yang perlu terus kita laksanakan.

Tema orasi ilmiah yang diberikan kepada saya pada kesempatan ini adalah “Meneguhkan Komitmen aktivis dalam Mengawal Agenda Pergerakan”. Tema ini, tentu saja merupakan tema yang serius, tetapi penting, khususnya bagi kalangan aktivis yang konsisten dan aktif di dunia pergerakan. Namun demikian, tentu saja terlebih dahulu, kita perlu pahami kembali, apa makna aktivis dan pergerakan, sebagai kata-kata kunci utama di dalam mengupas tema di atas.

Istilah “aktivis” dan “pergerakan” memang sudah bukan kata-kata yang asing bagi kita. Merujuk pada salah satu ensiklopedia, pengertian umum *activist*

atau *activism* ialah *intentional action to bring about social change, political change, economic justice, law enforcement, or environmental wellbeing*. Jadi, aktivis adalah mereka yang aktif menggeluti wacana-wacana dan gerakan bagi perubahan sosial dan politik, keadilan ekonomi, penegakan hukum, dan lingkungan hidup.

Tentu saja, yang membedakan antara aktivis dan bukan aktivis adalah, aktivis memiliki perhatian lebih, *concern* terhadap isu-isu penting yang menyangkut kemaslahatan bersama, apakah di bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, atau lingkungan hidup. Ada idealisme yang diperjuangkan oleh aktivis.

Idealisme itulah yang menjadi ciri dasar aktivis, yakni prinsip dasar dan keyakinan yang mendasari pergerakan yang terus-menerus memperjuangkan sesuatu kebenaran, hingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Pergerakan atau *movement* merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh aktivis untuk mengaksentuasikan perjuangannya. Biasanya corak pergerakan itu, dalam konteks ini, disebut pula sebagai suatu *social movement* (gerakan sosial). Dengan melakukan gerakan sosial, para aktivis perubahan sosial dan politik, berupaya untuk mempengaruhi keadaan agar berubah ke kondisi yang lebih baik dan ideal.

Apabila kita tilik pada perspektif Ilmu Sosiologi, maka gerakan sosial atau *social movement* itu, dapat dilihat dari berbagai jenis atau model pergerakan. Dilihat dari *scope*-nya misalnya, terdapat dua jenis gerakan, yakni gerakan reformasi dan gerakan radikal. Gerakan reformasi (*reform movements*), yakni gerakan yang dimaksudkan untuk mendesakkan perubahan secara mendasar atas norma dan aturan hukum yang ada sebelumnya, yang dinilai sudah tidak layak untuk diterapkan, namun gerakan ini dilakukan secara sistematis, *gradual*, tanpa kekerasan atau damai (*peacefull*), dan melibatkan segenap elemen.

Sementara itu gerakan radikal (*radical movement*), hampir sama dengan gerakan reformasi, namun dilakukan dengan pendekatan atau cara-cara yang ekstrim dan radikal, bahkan dengan diwarnai aksi-aksi kekerasan (*violent*), karena menginginkan perubahan yang cepat dan drastis (revolusioner).

Dari sudut jenis perubahan (*type of change*), para Sosiolog membedakannya ke dalam *innovation movement* dan *conservative movement*. *Innovation movement* menginginkan hadirnya sesuatu yang inovatif, yang baru dan bermanfaat, serta tidak merusak lingkungan. Sementara, *conservative movement*, sebaliknya merupakan jenis pergerakan yang dilakukan untuk melindungi nilai-nilai yang diyakini dari berbagai macam gempuran yang dapat mendegradasi nilai-nilai masyarakat.

Dari sudut cakupan atau *range*-nya, maka sebuah *social movement* dapat bersifat *global movements* (cakupan internasional), *local movements* (nasional atau lokal), dan juga apa yang disebut sebagai *multi-level movements*, yakni gerakan sosial yang menjadi tren abad ke-21, dimana suatu pergerakan dilakukan secara sistematis dan memiliki pengaruh luas dari tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Tradisi aktivitas di dunia pergerakan di Indonesia, sudah sedemikian menyejarah, setidaknya apabila kita tilik kembali ke masa pergerakan nasional, yang ditandai dengan berdirinya organisasi Boedi Oetomo, pada 1908, yang tentu saja tanpa mengabaikan eksistensi organisasi-organisasi lain yang berskala nasional pada saat itu. Era kebangkitan nasional, yang lantas berpuncak pada Sumpah Pemuda 1908, merupakan momentum-momentum historis dunia pergerakan kita, yang dipelopori khususnya oleh para pemuda terpelajar (mahasiswa) dalam mengupayakan kemerdekaan Indonesia.

Alhamdulillah pada pergerakan mereka membuahkan hasil dengan diproklamasikannya kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 oleh aktivis pergerakan nasional yang direpresentasikan oleh Soekarno dan Hatta.

Selanjutnya, dalam sejarah pasca-kemerdekaan, aktivitas dunia pergerakan kita juga marak, tentu saja hal itu diorientasikan untuk mengisi kemerdekaan yang diprakarsai oleh Bapak Bangsa (*The Founding's Fathers*).

Pada era-awal kemerdekaan hingga hadirnya Orde Baru, 1966, dunia pergerakan nasional kita ditandai oleh merebaknya kekuatan politik dengan beragam spektrum yang mencerminkan keberagaman sosial kita sebagai bangsa yang plural. Herbert Feith dan Lance Castles mencatatnya ke dalam tumbuhnya berbagai politik aliran, yakni aliran Islam, Nasionalis, Tradisionisme-Jawa, Komunis dan di sisi lain ada kelompok Militer yang turut mewarnai dunia politik nasional pada saat itu. Dunia politik kita juga ditandai oleh Pemilu 1955, dan berbagai peristiwa politik pada era Demokrasi Parlementer, yang berakhir saat Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan membawa era politik Indonesia pada Demokrasi Terpimpin, dengan menawarkan suatu ideologi Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis).

Pada zaman Demokrasi Terpimpin, banyak aktivis pergerakan yang ditangkap karena tidak sejalan dengan ideologi Nasakom, seperti Buya Hamka, Mochtar Lubis dan sebagainya. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, dan Bung Hatta pun mengkritik kepemimpinan Soekarno yang mengarah pada praktik otoritarian, dengan membuat tulisan terpublikasi dengan judul "Demokrasi Kita". Tokoh perjuangan lainnya, Sjahrir, juga mengkritik keras praktik pemerintahan yang dinilai cenderung fasistik.

Namun demikian, perkembangan politik kita saat itu, kemudian berubah. Pasca-peristiwa G30S/PKI 1965, hadir lah era Orde Baru. Pada era Orde Baru dunia pergerakan kita juga mengalami pasang naik dan surut. Hadirnya Orde Baru tak lepas dari aktivisme pemuda, pelajar dan mahasiswa, yang bahu-membahu dengan kekuatan anti-Komunis merobohkan rezim Orde Lama. Pada fase politik 32 tahun Orde Baru, dunia pergerakan kita diwarnai oleh mengemukanya beragam isu, seperti sebagaimana yang mengemuka pada awal 1970-an, antara lain isu anti-korupsi, "golongan putih", menolak pembangunan Taman Mini, dan sebagainya. Kritik pada sentralisme kekuasaan juga merebak pada pertengahan dan akhir 1970-an, misalnya dengan terbentuknya Kelompok Petisi 50, dan kelompok-kelompok kritis lain yang marak pada 1990-an.

Pola sentralisme kekuasaan, homogenisasi politik, dan praktik politik yang semi-otoritarian sebagai konsekuensi pilihan rezim Orde Baru yang mempraktikkan, apa yang populer disebut sejumlah pakar politik sebagai, sistem Negara Otoritarian Birokratik (NOB), membuat “negara” (state) justru menjadi “*common enemy*” kalangan pergerakan, yang didominasi oleh aktivis LSM, pemuda dan mahasiswa.

Puncak dari praktik negara Orde Baru, ialah kegagalannya mempertahankan prestasi pertumbuhan ekonomi, dimana fondasi ekonomi nasional, ternyata tidak kebal terhadap krisis moneter yang terjadi pada 1997, yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis politik, yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Perubahan politik dari rezim Orde Baru ke era reformasi, sebagaimana kita catat bersama, tak lepas dari keberhasilan dunia pergerakan kita, dimana gerakan reformasi berhasil merubuhkan Orde Baru, dan memprakondisikan perubahan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang komprehensif, yang diawali dengan revisi UU bidang Politik, hingga amandemen UUD 1945 yang berakhir pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Dari berbagai jenis gerakan sosial yang saya uraikan di atas, sejak 1998, corak gerakan sosial kita adalah gerakan reformasi. Sudah jelas kiranya, reformasi berbeda dengan revolusi. Di dalam suatu gerakan reformasi, keinginan kita untuk menata ulang sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, harus betul-betul dilakukan secara arif dan bijak, dan karenanya gerakan reformasi tetap bertumpu pada corak *transformational movement*.

Menurut pakar politik Samuel P. Huntington, perubahan yang reformatif lebih bersifat transplasi (*transplacement*), dimana elite-elite atau aktor-aktor baru bekerjasama dengan elite-elite atau aktor-aktor lama melakukan perubahan mendasar dalam kehidupan sosial dan politik mereka. Namun, manakala gerakan

reformasi itu sudah berjalan, maka pendekatan transformasionallah yang seharusnya mengemuka, yakni ketika gagasan-gagasan yang baik dan konstruktif ditransformasikan dengan baik ke segenap elemen yang ada, dan kemudian ditindaklanjuti dengan aksi-aksi yang konkrit untuk menyempurnakan kebijakan, menuju kondisi yang lebih baik.

Reformasi, menurut almarhum Nurcholish Madjid, bukan merusak masa lalu, karena masa lalu adalah bagian integral dari perjalanan sejarah kita. Reformasi, menurut Nurcholish adalah mengambil apa-apa yang baik yang pernah diterapkan di masa lalu untuk kebaikan masa kini dan masa depan, serta meninggalkan apa-apa yang buruk yang pernah diterapkan di masa lalu (termasuk meninggalkan mentalitas yang menghambat kemajuan bangsa). Reformasi, kalau demikian, juga menghendaki perubahan mental dan *mindset* kita dalam menapaki sejarah masa depan bangsa kita. Masa depan harus lebih baik, ketimbang masa kini dan masa lalu. Dan masa kini pun harus lebih baik ketimbang masa lalu. Sebagai aktivis, kita harus tetap *concern* pada konsentrasi kita masing-masing di berbagai bidang, dan terus berjuang melakukan perubahan, ke arah yang lebih baik.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan sosial politik di Indonesia dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui, kita telah sukses menyelenggarakan pemilu legislatif dan Pilpres 2009. Pada saat ini, anggota DPR hasil pemilu 2009 telah dilantik, demikian juga komposisi dan personalia pimpinan DPR, yang kebetulan saya ketuai. Demikian pula dengan DPD, yang diketuai oleh Bapak Irman Gusman. Lembaga MPR juga telah menetapkan pimpinan MPR, yang diketuai oleh Bapak HM Taufiq Kiemas. Sementara itu, juga sudah kita ketahui bersama, presiden dan wakil presiden terpilih kita untuk periode 2009 – 2014 adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Bapak Boediono, yang *Insyallah* akan dilantik pada 20 Oktober 2009.

Dengan lansekap politik baru dimana kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, memperoleh dukungan penuh dari berbagai partai politik, yakni Partai Demokrat (148 kursi DPR), Partai Keadilan Sejahtera (57 kursi DPR), Partai Amanat Nasional (46 kursi DPR), PPP (38 kursi DPR), PKB (28 kursi DPR), serta ditambah lagi dengan Partai GOLKAR (106 kursi DPR), maka pemerintahan Presiden SBY semakin mantap dalam memperoleh dukungan politik dan stabilitas hubungan pemerintah-DPR. Hal tersebut tentu saja akan lebih memudahkan pelaksanaan kebijakan dan program-program pemerintah, yang memperoleh dukungan kuantitatif dan kualitatif dari DPR sebagai mitra penting pemerintah dengan tetap mengedepankan sistem *check and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Salah satu ciri pemerintahan Presiden SBY lima tahun ke depan adalah, bahwa pemerintahan ini diselenggarakan dengan semangat kebersamaan, dengan melibatkan segenap partai-partai politik yang mendukung Koalisi pemerintahan, serta kekuatan-kekuatan politik lain yang diikutsertakan di dalam membangun kebersamaan tersebut, sebagaimana yang akan tercermin di dalam komposisi dan personalia Kabinet mendatang (yang pada saat ini masih dalam proses penyusunan). Dalam menyusun kabinet, Presiden memiliki kewenangan dan hak prerogatif, dan saya yakin dengan kearifan yang beliau miliki, Presiden SBY akan dapat membentuk suatu kabinet yang kompak, sinergis, dan dapat bekerja dengan baik –termasuk sebagai mitra kerja dengan DPR.

Dengan lansekap dan realitas politik sedemikian, tentu saja, muncul pertanyaan dari teman-teman aktivis, apakah DPR akan dapat menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal, manakala realitas empiris yang ada menunjukkan dukungan yang kokoh atas kekuatan-kekuatan politik yang ada ke dalam Koalisi mendukung pemerintahan?

Dalam pidato perdana pasca-pelantikan saya sebagai Ketua DPR, saya antara lain mengajak kepada segenap anggota DPR untuk senantiasa mengimplementasikan prinsip demokrasi "*checks and balances*" dan mengoptimalkan kinerja kedewanan dalam rangka menjalankan fungsi legislasi,

anggaran dan pengawasan (kontrol) atas berbagai kebijakan pemerintah. Dalam tata politik dan kenegaraan kita, lembaga DPR sejajar dengan lembaga eksekutif sebagai mitra kerjanya. Oleh sebab itulah, kami akan berusaha untuk menjalankan amanat yang diberikan kepada kami, sebagai anggota DPR, untuk senantiasa optimal dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, khususnya tetap **kritis-konstruktif** dalam menjalankan fungsi pengawasan atas berbagai kebijakan pemerintah.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Kita perlu memahami bahwa dalam suatu sistem pemerintahan yang berbentuk presidensial, format oposisi politik yang ditunjukkan oleh keberadaan “partai-partai politik oposisi”, tidaklah tepat, mengingat Kabinet Pemerintahan tidak bertanggungjawab kepada parlemen seperti yang dipraktikkan di sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem pemerintahan presidensial, menteri-menteri kabinet bertanggungjawab kepada Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu yang demokratis. Dengan kata lain, pelaksanaan format sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal praktik oposisi politik, sebagaimana diterapkan pada sistem parlementer –sehingga manakala terdapat partai politik yang menyatakan dirinya sebagai “partai oposisi”, maka sesungguhnya merupakan suatu kerancuan. Namun demikian, pemerintahan Presiden SBY tetap menghormati partai-partai politik yang tidak melibatkan diri di dalam pemerintahan, sebagai bagian dari pilihan politik yang demokratis.

Dalam berbagai kesempatan Presiden SBY mengatakan bahwa kritik dan masukan terhadap pemerintah, bisa datang dari mana saja, termasuk dari masyarakat, LSM, dan kekuatan “civil society” lainnya. Pemerintah tidak anti-kritik, dan tentu akan menerima kritik-kritik yang ada dengan lapang dada dan sikap obyektif. Namun demikian, kritik-kritik yang disampaikan perlu dilakukan secara benar, tidak melalui cara-cara yang anarkhis dan jauh dari nilai-nilai demokrasi, dan sopan santun politik.

Dalam konteks inilah, para aktivis pergerakan sosial bukan tidak tertutup ruang geraknya dalam menyampaikan kritik. Para aktivis pergerakan sosial justru masih sedemikian luas memiliki ruang ekspresi di dalam memperjuangkan idealismenya, bagi kebaikan kita bersama, menuju kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan lebih baik, semakin maju dan sejahtera.

Di sisi lain, saya berharap para aktivis meningkatkan kualitas komunikasinya dengan lembaga DPR, karena DPR adalah “rumah rakyat” yang *Insyallah* selalu aspiratif dalam mendengarkan masukan dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan teman-teman aktivis, sebagai “penyambung lidah aspirasi rakyat”. Dengan kualitas komunikasi yang baik dan saling menghargai, serta penyampaian dengan elegan dan bermartabat, damai dan tidak anarkhis, maka *Insyallah* perjuangan kita bersama akan menuai keberhasilan. Sehingga, jangan sampai para aktivis pada akhirnya menjadi “parlemen jalanan”, yang rawan provokasi dan aksi-aksi anarkhis dan destruktif.

Dalam konteks inilah, saya mengajak, marilah kita bersama-sama berjuang secara elegan dan etis, serta tetap dalam koridor konstitusi, tanpa mengurangi daya kritis kita masing-masing.

Dan oleh karena itulah saya sepakat dengan tema orasi ini, bahwa para aktivis harus terus mengukuhkan komitmennya di dalam menuntaskan agenda reformasi, apa-apa yang belum dinilai sempurna, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki, tetapi tanpa harus dengan merusak. Saya kira ini pesan penting dari orasi yang saya sampaikan.

Kami yakin, masyarakat kita pun merupakan masyarakat yang semakin kritis dan mampu menilai perkembangan sosial politik secara obyektif. Saya yakin DPR, pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara lain, bukanlah entitas-entitas politik yang statis, melainkan dinamis dan senantiasa memantau dan mencermati perkembangan dan dinamika yang terjadi pada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai.

Demikianlah orasi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, khususnya kalangan aktivis pergerakan, untuk terus *concern* di bidangnya masing-masing, mengdepankan idealisme yang ada, berjuang bagi masa depan bangsa yang lebih baik dan bermartabat.

Sekian, *Wallahu Muwafiq Ila Aqwamithariq,*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, 18 Oktober 2009

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Marzuki Alie', written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

H. MARZUKI ALIE